KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH

RESOR KARANGANYAR

**RENCANA STRATEGIS**

**KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR**

**TAHUN 2015 – 2019 (PERUBAHAN)**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. Kondisi Umum.**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Penciptaan teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan baru telah mengubah susunan dan tatanan dunia secara fundamental, dimana perubahan-perubahan pada Gatra sosial, politik ekonomi dan pertahanan keamanan yang sulit dilepaskan dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 33 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pembangunan Nasional Indonesia harus berkesinambungan dan menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia yang demikian, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah menetapkan dan merumuskan visi **“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.”** Penjabaran dan tafsir dari visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan pembagian empat tahapan pelaksanaan, yaitu : RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Paradigma …

Paradigma baru Polri sebagai lembaga sipil yang mandiri dalam bidang penegakkan hukum, dijalankan dalam payung hukum Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan agar Polri melakukanreformasi secara total dan berkelanjutan. Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (*power*) oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran).

Dalam pelaksanaan Renstra I tahun (2005-2009) Polres Karanganyar berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern, Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polres Karanganyar tahap I yang harus diwujudkan sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Ayat (1, 2 dan 3), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan Renstra II (2010-2014), telah melaksanakan pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan di Polres Karanganyarsebagai pelayan Kamtibmas menuju pelayanan prima, tegaknya hukum dan Kamtibmas yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Renstra Polres Karanganyar tahap II tahun 2010-2014, dengan sasaran menbangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan *Partnershipbuilding*, serta telah dijabarkan dalam program dan anggaran Polres Karanganyar.

Pelaksanaan Renstra Polres Karanganyar 2010-2014 sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas, khususnya konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah Polres Karanganyar, yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait, Polres Karanganyar secara umum telah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Renstra Polri 2010-2014.

Kamtibmas …

Dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri yang profesional, bermoral, modern dan terpercaya dilaksanakan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Polri yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai ratio Polisi yang ideal pada akhir tahun 2019.

Sampai dengan akhir Tahun 2017 jumlah personel Polres Karanganyar sebanyak :834 orang terdiri dari 785Polri dengan kepangkatan; Pamen: 5 orang, Pama: 77 orang Bintara : 703orang dan 49 PNS dengan kepangkatan ; Gol. III :25 orang, Gol. II :23 orang, Gol. I :1 orang yang bertugas di seluruh jajaran wilayah Polres Karanganyar, Strategi yangdilaksanakan melalui penambahan anggota baru Polri dengan mengutamakan putra daerah (prinsip *”local boy for the local job”*).

Sedangkan pendidikan Perwira Polri melalui Akpol, SIPSS dan Bintara Polri yang dijaring dari calon berkualitas terutama aspek moral kepribadian dan intelektual, dalam proses werving dilakukan secara proporsional, bersih, transparanobyektif serta akuntabel, dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas, hal ini sesuai program unggulan Polri *Quick Wins*.

Di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, guna memberikan dukungan bagi peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan modern serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa, telah dibangun kekuatan *soft power* dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), membangun dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi, membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat.

Bidang …

Bidang Operasional, secara umum situasi Kamtibmas cenderung stabil dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan.Meskipun dalam kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai gangguan Kamtibmas dengan berbagai bentuk dan intensitas yang meningkat namun secara umum dapat tertangani, dampak dari gangguan Kamtibmas dapat dikendalikan.Jumlah gangguan Kamtibmas dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dapat diselesaikan secara optimal, sehingga secara umum tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai bentuk kejahatan konvensional masih didominasi oleh kasus perjudian dan premanisme.Kasus perjudian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang signifikan dan pada kejahatan Transnasional telah berhasil diungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara diantaranya pengungkapan kerugian negara akibat pembalakan hutan (*illegal logging), illegal fishing dan illegal mining*bersama – sama dengan Instansi terkait melalui Operasi Kepolisian, sedangkan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi adalah penanganan unjuk rasa anarkhis yang berdampak politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Polri 2015 – 2019, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan arah kebijakan Tahun 2009-2014 dalam rangka menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh didukung Sinergi Polisional dengan elemen birokrasi (kementerian/lembaga) dalam menjaga supermasi hukum. Tahun keempat Renstra ini merupakan momentum yang sangat menentukan dalam kelanjutan perencanaan di lingkungan Polri khususnya Polres Karanganyar dalam terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing Bangsa dan keunggulan Nasional lebih khusus wilayah hukum Polres Karanganyar yang berwawasan ketertiban dan keamanan.

Pencapaian…

Pencapaian sasaran prioritas Polri khususnya Polres Karanganyar tahun 2019 tetap mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya maupun keberhasilan yang masih akan dicapai di bidang operasional,pembinaan kekuatan maupun pembangunan kekuatan pada tahun 2019 yang diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya Polri khususnya Polres Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum serta Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat, guna mewujudkan keamanan nasional lebih khusus keamanan wilayah hukum Polres Karanganyar telah menunjukan keberhasilan, ditandai dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Hal ini menjadi modal awal dalam membangun keikutsertaan masyarakat, lembaga/Instansi sebagai mitra Polri oleh sebab itu pencapaian arah kebijakan Polri tahun 2019 diprioritaskan pada mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra daya saing Bangsa dan keunggulan Nasional, lebih khusus wilayah hukum Polres Karanganyar yang berwawasan ketertiban dan keamanan.

Disamping itu kebijakan pimpinan Polri dalam program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui 10 program prioritas yang meliputi : pengungkapan dan penyelesaian kasus menonjol; meningkatkan pemberantasan preman; kejahatan jalanan; perjudian; narkoba; illegal logging; illegal fishing; illegal mining; human trafficing dan korupsi; penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror; pembenahan kinerja Reserse denganmelanjutkan program ” Penguatan Reserse ” melalui peningkatan kompetensi penyidik; implementasi struktur organisasi Polri yang baru mempercepat perubahan budaya Polri dengan mengacu perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (Culter set); Polri; menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) diberbagai sentra kegiatan publik; mengembangkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE); dan pada tahun 2015 merupakan tahap awal (tahap I) dari revitalisasi Polri dengan membangun dan mengembangkan sistim informasi terpadu serta persiapan pengamanan Pemilu 2019.

awal…

Perkembangan dan perubahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat juga merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rancangan Renja Tahun Anggaran 2019.Perubahan tersebut meliputi perkembangan lingkungan strategis global dan regional maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan (Ipoleksosbud dan Kam).

Di bidang SDM, Polres Karanganyar menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: penambahan dan penyusutan personil yang masih tidak seimbang; kualitas SDM yang belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang diharapkan; dan kesejahteraan personil yang belum memadai. Sedangkan dibidang sarana dan prasarana, Polres Karanganyar masih menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: masih banyak fasilitas Polri yang belum terbangun; masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; serta peralatan yang tidak layak pakai.

Di bidang anggaran, dukungan anggaran bagi Polres Karanganyarberupa belanja barang untuk mendukung tupoksi Polri masih minim sehingga mengakibatkan pelaksanaan tupoksi selama ini tidak dapat terlaksana secara optimal.Tunjangan kinerja bagi personil Polri dengan beban dan tantangan tugas dilapangan yang semakin berat dan komplek masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan K/L lainnya.Selain itu belanja pemeliharaan yang tersedia dirasakan tidak memadai dikarenakan penambahan peralatan materiil dan pembangunan fasilitas Polri selama ini ternyata tidak diimbangi dengan penambahan anggaran belanja pemeliharaan tersebut.

Pada pelaksanaan Renstra III (2015-2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kabinet kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas dibawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas), yaitu:

a. Menghadirkan…

a. Menghadirkan kembali negarauntuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif:

b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

d. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya;

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas Sembilan juta hektar;

f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik;

h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;

i. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Posisi Polri dari aspek kelembagaan dan struktural dalam nawa cita diatas adalah menghadirkan Negara (melalu Polri) utuk melindungi dan menciptakan rasa aman segenap warga Negara.Penjelasan berikutnya terdapat pada nawa cita huruf b dan d, yang secara jelas dan konkrit.menjelaskan tupoksi Polri dalam penegakkan hukum dan pelayanan masyarakat. Namun pada dasarnya, peran Polri dalam program nawa cita pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak terbatas pada butir b dan d, akan tetapi seluruh upaya pembangunan ekonomi domestic maupun internasional harus didukung dengan menciptakan keamanan dan rasa aman.

b …

Selaras dengan keinginan kabinet kerja untuk membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemulihan kepercayaan publik, maka Polri melakukan pembinaan mental dan disiplin terus menerus dikalangan para anggotanya, dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan polisi yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam menjalankan tugas penegak hukum dan Kamtibmas, melakukan evaluasiperundang-undangan terkait, berbasis pada arah kebijakan penataan Polri menjadi institusi profesional, dan menyediakan anggaran yang memadai baik untuk tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggotaPolri.

Oleh karena itu Polres Karanganyar akan mengoptimalkan pelaksanaan 11 (sebelas) program prioritas Kapolri dan 8 program Quick Wins Polri Tahun 2015-2019 dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, terdiri dari :

a. Penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;

b. Perburuan dan penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme;

c. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;

d. Pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus ISIS);

e. Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri (Polres, Polda, Mabes Polri);

f. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;

g. Pembentukan tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan KPK);

h. *Crash* program pelayanan masyarakat : pelayanan bersih dari percaloan.

Polres …

Polres Karanganyar ke depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin komplek dan mengarah pada *transnational crime* (kartel, *bioterrorism, narcoterorism,cyber crime*). Perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi Tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sector kebijakan yang menimbulkan potensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan Kamtibmas di masyarakat.Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap perkembangannya gangguan Kamtibmas.

1. **Potensi dan Permasalahan**
2. **Potensi Gangguan Keamanan**

1) Perkembangan aspek kehidupan

a) Kondisi geografis, demografis dan sumber daya alam

(1) Geografi

- Kabupaten Karanganyar terletak di antara 110º 40’ – 110º 70’ bujur timur dan 7º 28’ – 7º 46’ lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 22-31 derajat celcius. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 773,78 KM² dengan batas daerah Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Magetan (Jatim) di sebelah timur, Kabupaten Boyolali dan Surakarta di sebelah barat serta Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri di sebelah selatan.

- Jaringan jalan raya diwilayah Kabupaten Karanganyar secara umum terdiri dari jalur utara yaitu jalan jurusan Solo – Surabaya lewat Palur-Kebakkramat, jalur ekonomi, jalur cepat dan padat sehingga rawan laka lantas dan kemacetan. Jalur timur, jalan jurusan Solo – Tawangmangu lewat Palur-Karanganyar-Tawangmangu merupakan daerah wisata dengan arus padat khususnya pada hari-hari libur. Jalur Barat, jalan jurusan Solo-Puwodadi lewat Kecamatan Gondangrejo dengan kondisi jalan tidak rata sedangkan arus kendaraan padat dan rawan kecelakaan.

Surabaya …

- Secara administratif Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 773,78KM².

(2) Demografi

- Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar mencapai 949.471 jiwa dengan komposisi penduduk pria sejumlah 473.357 jiwa dan penduduk wanita sejumlah 466.585 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai rata-rata 1.227 per M², dengan jumlah penduduk yang cukup besar dengan heterogenitas yang cukup tinggi baik dari suku, agama, maupun adat memberikan konsekuensi logis terjadinya mogilitas orang/barang yang cukup tinggi pula.

(3) Demografi

- Kondisi wilayah yang beragam dengan kontur tanah yang bervariasi menjadikan potensi wilayah Karanganyar cukup beragam. Untuk tanah persawahan di Kabupaten ini mencapai 6.810.759,60 Ha**,** tanah perkebunan mencapai 14.693.656,17 Ha**,** serta luas Hutan Negara yang mencapai 16.775.807,93Ha. Adapun tanah yang lain terbagi atas pemukiman, tegalan dan padang rerumputan. Jumlah obyek wisata cukup banyak sekitar 13 obyek wisata umumnya di wilayah pegunungan.

wisata …

b) Ideologi

(1) Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta masih adanya kelompok radikal kanan yang belum bisa menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalam berbangsa dan bernegara mereka tetap ingin mempertahankan syariat islam sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara, hal ini merupakan ancaman bagi Dasar Negara Kesatuan RI, dengan dibubarkannya badan pembinaan pelaksanaan pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (BP-7), tidak ada lagi lembaga ataupun pihak lain yang berupaya untuk mensosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

(2) Sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah hingga merubah pelajaran tentang inti pribadi bangsa yang berlandas pada Nilai Moral Pancasila kurang diperhatikan, sehingga Memungkinkan pudarnya nlai – nilai luhur Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Padahal bermula dari Pendididkan Sekolah nilai nilai Moral Pancasila dapat ditanamkan;

(3) Masih ada kelompok radikal tertentu berbasis agama yang masih meragukan dan menentang Pancasila sebagai dasar negara dan berusaha mempengaruhi masyarakat untuk merubah Pancasila dengan ideologi lain (NII/MIM), memecah kesatuan dan persatuan bangsa dengan melakukan upaya rekrut terhadap masyarakat untuk dibaiat selanjutnya ditanamkan ajaran ideologinya dengan cara membujuk dan menekan untuk mencari dana bagi kemajuan operasional organisasinya;

(4) Beredarnya …

(4) Beredarnya buku ABB (Abu Bakar Ba’asyir) yang berjudul TADZKIROH (Peringatandan Nasehat karena Allah ) yang berisikan hasutan-hasutan terhadap umat Islam untuk menentang pemerintah yang sah karena dianggap bahwa pemerintahan yang ada saat ini

Thogut atau tidak sejalan dan berseberangan dengan ajaran agama Islam.

Buku ini dapat mempengaruhi generasi mudakhususnya ditempat tertentu seperti di pondok-pondok pesantren kelompok ABB (Abu Bakar Ba’asyir) atau kelompok Igaras (Islam Garis Keras) untuk tidak mempercayai bahkan melawan pemerintah;

(5) Adanya konflik antara pengikut ajaran Lembaga Pengkajian Pendalaman Al-Quran Tauhid ( LPPAT ) / Yayasan Tauhid Indonesia ( YATAIN) dengan Kelompok Islam Garis Keras ( LUIS, FPIS) Karanganyar, dan Kelompok pengikut Jamaah Al Muslimin di wilayah Kerjo, Matesih, Kebakkramat dan Jenawi dengan umat Islam di Karanganyar.

c) Politik

(1) Pemilu di tahun 2014 kemungkinan masih membawa dampak perselisihan dalam penggalangan massa di tahun yang lalu yang masih menyisakan dendam antar caleg maupun kader pendukung;

(2) Aksi penyampaian pendapat dari masyarakat yang tidak puas dengan Caleg dan presiden yang terpilih dapat menibulkan gangguan kamtibmas;

(3) Persiapan Pemilihan Pilkades tahun 2017, Pilgub dan Pilbup di tahun 2018 akan berpengaruh terhadap situasi politik dalam pilleg dan pilpres di tahun 2019;

(4) Adanya …

(4) Adanya kelompok mahasiswa dari perguruan tinggi yang responsif dan reaktif dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah, merupakan kekuatan potensial yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok elite Parpol tertentu dalam mencapai tujuan politis.

(5) Meningkatnya intensitas aksi unjuk rasa kelompok para Kades dan perangkat desa yang menuntut pengesahan RUU Pemerintahan desa menjadi UU, mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan dan minta diangkat menjadi PNS, kebijakan pemerintah yang menyepakati tuntutan para perangkat desa terkait dengan pengesahan UU pemerintah desa, dapat berdampak pada pelaksanaan Pileg maupun Pilpres karena dikhawatirkan para perangkat desa se-Karanganyar akan memboikot pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

d) Ekonomi

(1) Ketatnya suku bunga yang tinggi oleh perbankan dan dampak dari krisis keuangan global maupun adanya perjanjian perdagangan bebas Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2015 akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Karanganyar;

(2) Dalam sektor pertanian dengan banyaknya tanaman padi yang mengalami puso di beberapa kecamatan akibat dari bencana alam maupun bawah hama, berimplikasi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan daya beli masyarakatkalangan bawah serta akan berpengaruh terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;

(3) Permasalahan pupuk yang terjadi pada tahun 2013 akan tetap terjadi pada masa-masa tanam di tahun berikutnya, dengan naiknya harga diatas HET maupun kelangkaan pupuk di pasaran karena subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat dan adanya sistem kuota yang rentan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.

pupuk …

(4) Masih tingginya angka pengangguran berpeluang munculnya tindak kejahatan dan aksi-aksi protes menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan rakyat kecil sebagai bentuk krisis kepercayaan kepada pemerintah, terutama kebijakan terkait BBM, Gas, Kenaikan TDL.

(5) Adanya permasalahan pengusaha dan karyawan, antara lainketerlambatan pembayaran gaji karyawan, maupun akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan adanya aksi penyampaian pendapat dalam berbagai bentuk, dan adanya aksi penyampaian pendapat dalam berbagai bentuk.

(6) Munculnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM (Hapus Outsourcing Tuntut Upah Manusiawi). Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditunggangi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan sitkamtibmas;

(7) Munculnya reaksi dari para pengusaha terkait dengan ditetapkannya UMK Kabupaten Karanganyar yang baru sebesar Rp. 1.060.000,- mereka rasa memberatkan kalangan pengusaha sehingga mereka mengancam akan melakukan PHK atau penangguhan terhadap pembayaran UMK yang telah ditetapkan sehingga hal ini dapat memicu reaksi para buruh untuk melakukan unjuk rasa.

(8) Adanya …

(8) Adanya permasalahan perusahaan dengan lingkungan berkaitan pembuangan limbah industri yang tidak dilakukan pengelohan seseuai aturan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) sehingga akan menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitarnya.

(9) Kebijakan pemerintah yang meningkatkan kuota import terhadap komoditas tertentu seperti beras, gula, bawang merah, kentang, kedelai bahkan garam sangat memukul atau mematikan para pengusaha dan petani karena mereka tidak akan mampu bersaing dengan harga barang import yang lebih murah dan mutu yang lebih bagus.

(10) Masalah-masalah sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas terutama terhadap kriminalitas antara lain:

(a) Bidang Perindustrian

- Kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas eksport / import untuk kepentingan pribadi;

- Timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kekurangan tenaga ahli, sistim upah dan hak normatif lainnya serta PHK);

- Kesulitan memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi, sebagai dampak dari krisis keuangan global yang berkelanjutan;

- Masuknya paham-paham / pengaruh budaya baru yang dibawa oleh tenaga kerja asing.

(b) Bidang …

(b) Bidang Perdagangan :

- Masih adanya kesenjangan antara pengusaha besar / menengah dengan koperasi dan pengusaha ekonomi lemah;

- Adanya dominasi perdagangan oleh golongan WNI keturunan Cina dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang bermuatan SARA, pencurian, kebakaran/pembakaran, unjuk rasa, penganiayaan dan perkelahian;

- Adanya sistim perdagangan tidak sehat yang didasarkan pada golongan tertentu saja (eksklusivisme).

(c) Komunikasi dan Transportasi :

- Dengan kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan meningkatnya mobilitas pelaku

- kejahatan mendorong timbulnya kejahatan dengan pola dan modus operandi baru;

- Kejahatan dapat terjadi hampir di seluruh pelosok daerah;

- Pelaku kejahatan dapat menghilangkan jejak untuk menghindari kejaran petugas secara cepat karena mereka menguasai teknologi informasi dan transformasi.

(11) Peningkatan di bidang Pariwisata sebagai primadona yang mana keuntungan negara dapat menimbulkan bibit kejahatan antara lain :

(a) Terjadinyakebocorandana pembangunan / korupsi;

(b) Adanya …

(b) Adanya penyalahgunaan Surat Perintah Kerja (SPK);

(c) Terjadinya manipulasi data;

(d) Kejahatan Korporasi;

(e) Aksi kejahatan dengan modus paket wisata atau kejahatan di lokasi obyek wisata.

(12) Kejahatan korporasi dibidang per-Bankan timbul ke permukaan karena dampak negatif dari kebijaksanaan pemberian yang diselewengkan penggunaannya oleh para Bankir.Celah-celah kejahatan korporasi ini banyak disalahgunakan oleh mereka yang memiliki status pendidikan menengah ke atas dengan melanggar aturan-aturan yang ada, maka timbul kejahatankorporasi yang meliputi:

(a) Pemalsuan / penipuan, penggelapan;

(b) Warkat Bank;

(c) Bank gelap;

(d) Kejahatan terhadap hak cipta;

(e) Kejahatan pajak cukai;

(f) Kejahatan surat materai;

(g) Penyalahgunaan kartu kredit;

(h) Manipulasi neraca perdagangan percaloan.

e) Sosial Budaya

(1) Tingginya nilai - nilai budaya Jawa di wilayah Kabupaten Karanganyar dan adanya pengaruh globalisasi tehnologi dan informasi yang semakin transparan mengakibatkan terjadinya pergeseran perilaku sebagian masyarakat. Kondisi tersebut merupakan faktor korelatif yang dapat mengarah terhadap gangguan kamtibmas.

tersebut …

(2) Keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset bangsa seringkali dijadikan peluang untuk kepentingan kelompok tertentu dan elite politik dalam mencapai tujuannya dengan isue SARA dan solidaritas sehingga berakibat pada krisis persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Konflik internal dan antar agama yang pernah terjadi merupakan indikasi dan sebagai potensi konflik agama yang mungkin akan terjadi pada tahun - tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

(4) Fanatisme dan solidaritas yang sempit akibat pengaruh lingkungan pendidikan yang kurang dalam menanamkan aspek wawasan kebangsaan;

(5) Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang dianutnya (penerimaan pemahaman ajaran agama yang hanya sebagian);

(6) Adanya pengaruh dari kelompok tertentu dengan menggunakan sentimen agama untuk mencapai tujuannya;

(7) Munculnya konflik antar agama terkait dengan masalahpendirian tempat ibadah dan penggunaan bangunan yang bukan peruntukannya sebagai tempat ibadah.

Hal tersebut akan tetap terjadi apabila daya tampung atau tempat ibadah agama tertentu sudah tidak lagi mampu menampung jemaatnya untuk melakukan kegiatan ibadahnya sehingga mereka tetap berusaha mencari tempat baru untuk melakukan ibadahnya.

(8) Meningkatnya …

(8) Meningkatnya jumlah guru bantu/guru yang belum diangkat dengan tidak dibarengi untuk tingkat kesejahteraannya memicu timbulnya unjuk rasa dengan sasaran unjuk rasa hingga sampai tingkat pusat yang mengangkat issue tentang kesejahteraan guru yang kurang memadai dan masalah dana alokasi pendidikan sebesar 20 % dari APBN dimana dalam realisasinya tidak sesuai. Hal ini masih akan tetap berlanjut pada tahun 2014 mengingat belum ada solusi akan penyelesaiannya.

(9) Pengelolaan anggaran bidang pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan antara lain :

(a) Kasus ijasah palsu;

(b) Masalah Ujian Akhir Nasional;

(c) Masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat;

(d) Penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi bantuan Operasional Sekolah ( BOS );

(e) Sistem seleksi dan penerimaan siswa baik ditingkat dasar maupun ditingkat tinggi yang masih sarat dengan kolusi.

(10) Dari sektor perburuhan / tenaga kerja terdapat adanya beberapa permasalahan yang belum teratasi seperti masalah hak-hak karyawan dan PHK dengan bertambahnya perusahaan yang colaps akibat dari pengaruh krisis ekonomi global maupun dampak dari perdagangan bebas Asean - Cina dan masalah UMK yang nilainya belum dapat

memenuhi …

 memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan lain-lain berimplikasi terjadinya berbagai bentuk gangguan kamtibmas seperti unjuk rasa dan mogok kerja yang mengarah pada tindakan anarkhis seperti pengrusakan, penganiayaan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain.

(11) Konflik antar masyarakat dengan pemerintah terkait pendirian proyek-proyek pemerintah yang ada di Karanganyardan adanya turut campur LSM dan media certak maupun elektronik tertentu dapat semakin memperkeruh suasana.

f) Keamanan

(1) Aksi penembakan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Pos-pos Polisi dan ancaman terror bom melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek Vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan bahkan bom bunuh diri kemungkinan dapat terjadi di wilayah Kabupetan Karanganyar;

(2) Adanya beberapa warga Kabupaten Karanganyar ex napi teroris memungkinkan akan direkrut kembali oleh kelompok - kelompok baru maupun lama yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat;

(3) Aksi Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api masih akan mewarnai situasi keamanan di wilayah Kabupaten Karanganyar, dimana pernaah terjadi di wilayah Kecamatan

(4) Matesih aksi pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api dengan sasaran toko emas dan

pembobolan …

 pembobolan mesin atm serta aksi curras di SPBU;

(5) Aksi tawur massa maupun main hakim sendiri masih sangat mungkin terjadi dimana adanya solidaritas fanatisme sempit seperti “ Perguruan Silat SH Teratai ” serta adanya budaya-budaya kota yang kadang dibawa oleh para perantau yang tidak bisa diterima oleh warga masyarakat setempat terutama pada saat merayakan hari raya Idul Fitri dan perayaan Tahun Baru;

(6) Adanya beberapa daerah kabupaten yang merupakan basis kelompok radikal kanan antara lain wilayah kecamatan Tawangmangu, Jumapolo dan Jatiyoso dapat berpengaruh terhadap munculnya bentuk-bentuk gangguan kamtibmas antara lain aksi sweeping terhadap penyakit masyarakat maupun orang asing yang dianggap musuh dan aksi penghentian kegiatan agama lain dan se-agama yang dianggap tidak sesuai aturan;

(7) Masih adanya kemungkinan adanya imigran gelap yang bersembunyi di wilayah Kabupaten Karanganyar mengingat wilayah Kabupaten Karanganyar pegunungan dan berbukit. Selain itu tempat dataran tinggi sangat dipilih oleh kelompok tertentu untuk melakukan latihan militer.

## b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Karanganyar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, dapat dianalisis dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT, sebagai berikut :

1) Strenght …

1) Strength **(*Kekuatan*).**

a) Polres Karanganyar dengan kekuatan personil sebanyak 785 anggota Polri 49 anggota PNS, jumlah demikian hampir 70% merupakan putera daerah yang menguasai karakteristik daerah setempat.

b) Kekuatan personel yang dimiliki Polres Karanganyar tergelar mulai dari Polres sampai tingkat Polsek sebagai perkuatan Polres sesuai dengan struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat terus diperkuat secara bertahap baik secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya.

c) Dalam pelaksanaan tugasnya Polres Karanganyar dan seluruh jajarannya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

(1) Fasilitas .

(a) Mako Polres Karanganyar : 1 Unit

(b) Mako timur (Sat Lantas , Sat Narkoba dan

 Sat Reskrim) : 1 Unit

(c) Mako Polsek : 17 Unit

(d) Wisma Bhayangkara : 1 Unit

(2) Materiil .

(a) Diseluruh Polsek jajaran sudah dilengkapi dengan kendaraan operasional R4 sebagai sarana pendukung Opsnal, Masing-masing Polsek di jajaran Polres Karanganyar saat ini telah mempunyai dua kendaraan opsnal R4.

(b) Seluruh …

(b) Seluruh Polsek jajaran sudah dilengkapi dengan kendaraan operasional R2 baik untuk kegiatan patroli maupun kegiatan Babinkamtibmas.

(c) Polres Karanganyar dan jajaran sudah dilengkapi sarana dan prasarana sebagai sarana pendukung kegiatan operasional, meliputi :

- Ranmor R6 : 6 Unit

- Bus Middle : 2 Unit

- Ranmor R 4 : 57 Unit

- Ranmor R 2 : 162 Unit

- Ranmor R2 opsnal : 44 Unit

- Sedan Patwal : 4 Unit

- Pick up : 37 Unit

- A C : 33 Unit

- Kipas Angin : 47Unit

- Komputer : 140 Unit

- TV : 30 Unit

- Laptop : 5 Unit

- Printer : 94 Unit

- Genset : 1 Unit

- Alkomlek : 1 Unit

- Satwa (anjing) : 3 ekor

- Rak Kayu : 86 Unit

- Rak Besi : 7 Unit

- Perahu Karet : 1 Unit

- Papan Visual : 18 unit

d) Untuk …

d) Untuk mengantisipasi kerawanan dan kasus-kasus diwilayah jajaran Polres Karanganyar, telah dilengkapi senjata api dengan rincian sebagai berikut :

(1) Senpi Genggam : 284 Pucuk

(2) Senpi Bahu : 18 Pucuk

(3) Senpi : 182 Pucuk

e) Peningkatan kinerja anggota Polres Karanganyar dalam penanganan kejahatan berimplikasi kontijensi (terorisme), pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol, pemerantasan kejahatan dan penyakit masyarakat, sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada Polri.

f) Adanya tunjangan kinerja yang diberikan kepada personel dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

g) Adanya terobosan kreatif yang dilaksanakan Polres Karanganyar dengan dideklarasikan anti kekerasan dan terorisme yang ditandatangani oleh semua elemen masyarakat.

h) Seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh satker telah didukung anggaran sesuai DIPA Satker.

i) Reskrim dalam melakukan penyidikan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat / pelapor terhadap kasus yang ditangani dengan SP2HP ( Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ) di tiap-tiap tahapan.

j) Kemampuan mayoritas anggota yang sudah dibekali dengan berbagai pendidikan kejuruan dan pelatihan - pelatihan dalam menghadapi operasi, menjadikan pelaksanaan tugas menjadi terfokus, efisien dan sesuai dengan prosedur.

2) Kelemahan …

2) Kelemahan **(*Weaknes*)**

a) Dengan jumlah Polri 785personel sedangkan jumlah penduduk Kab. Karanganyar 949.741jiwa maka ratio perbandingan antara Polri dengan masyarakat 1 : 1.267sehingga masih kurang memadai untuk maksimalkan kegiatan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas.

b) Masih kurangnya sarana dan prasarana kepolisian yang dimiliki Polres Karanganyar sampai ketingkat Polsek dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri, antara lain :

(1) Belum semua Polsek memiliki akses jaringan internet;

(2) Masih ada beberapa kantor Polsek yang lahannya berstatus Pinjam Pakai, belum bersertifikat/ hak milik kepolisian (HM);

(3) Belum adanya tempat khusus untuk menyimpan barang bukti; kejadian laka lantas, pelanggaran tilang dan tindak pidana sehingga menimbulkan kerawanan (Rusak/ Hilang).

(4) Gudang penyimpanan senjata api belum sesuai standar keamanan;

(5) Masih kurangnya pemahaman serta aplikatif tentang perubahan perilaku teruta\ma pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set* ).

c) Masih adanya pers Polri yg belum mampu melaksanakan tupoksi bidang pembinaan dan operasional serta semangat kerja yang masih rendah.

d) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga mengakibatkan pengungkapan kasus belum maksimal.

e) Masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota sehingga memperburuk citra Polri dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

f) Kultur …

f) Kultur lama Polri yang masih dimiliki oleh sedikit anggota dapat memicu kesalahpahaman dengan instansi samping maupun masyarakat, yang dapat membawa dampak negatif pada situasi kamtibmas dan citra Polri.

g) Sarana komunikasi terutama HT yang jumlahnya terbatas, membuat mayoritas anggota tidak dapat memonitor situasi Kamtibmas dan pergerakan tugas. Sejumlah anggota berupaya menyiasatinya dengan pembelian HT secara swadaya.

h) Kurangnya pemberdayaan PNS Polri yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah pers PNS merupakan salah satu hambatan untuk memaksimalkan keberadaan anggota Polri di lapangan.

3) Peluang**(*Opportunities*).**

a) Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan polisi dan Masyarakat (BKPM).

b) Adanya kebijakan otonomi daerah di lingkungan Pemda sehingga memudahkan sarana komunikasi antara pemda Kab Karanganyar dengan Polres Karanganyar dalam bidang Harkamtibmas yang kondusif.

c) Adanya peran aktif dari instansi terkait yang mendorong Polri untuk terus maju dan dapat mewujudkan satuan yang tangguh dan mampu bersinergi dengan instansi terkait dalam membangun wilayah Karanganyar yang aman.

d) Adanya peluang dan kesempatan yang diberikan bagi personil Polri untuk menggali dan meningkatkan karier dan kemampuan baik dibidang ilmu kepolisian maupun pendidikan umum, berpotensi besar bagi terciptanya profil polri yang tangguh, profesional dan memiliki wawasan.

4) Ancaman …

4) Ancaman**(*Threats*)**

a) Masih adanya persepsi negatif terhadap kinerja Polri, baik dalam penanganan kasus pidana, pelayanan masyarakat maupun penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

b) Sikap sebagian masyarakat yang kurang bersimpati terhadap Polri, berpotensi untuk menciptakan gangguan kamtibmas dan menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan tugas Polri. Lebih lanjut, perilaku dan konflik pribadi yang dialami oleh sejumlah anggota berpeluang untuk mempengaruhi kinerjanya di lingkup tugas.

c) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang disebabkan pelanggaran etika kerja dan prosedur oleh anggota di lapangan , kurangnya kemampuan anggota untuk mengurangi budaya militer dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan yang belum maksimal kepada masyarakat.

d) Kritisnya masyarakat terhadap akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah sehingga menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang berpotensi terhadap munculnya perilaku menyimpang dari warga masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas.

e) Adanya kelompok Islam garis keras dan pendukung atau simpatisan Ormas Islam garis keras di wilayah Surakarta yang sering melakukan aksi sweaping di lokasi rawan Penyakit masyarakat di wilayah Hukum Polres Karanganyar, berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan kamtibmas.

f) Letak geografis Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo (Bekonang) yang merupakan daerah produksi miras ( CIU ) dan peredarannya secara bebas , sehingga berpotensi meningkatnya penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Karanganyar

g) Adanya …

g) Adanya beberapa perusahaan colaps karena kenaikan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar sehingga para pengusaha tidak mampu membayar gaji karyawan dan mengakibatkan PHK secara sepihak yang berdampak meningkatnya pengangguran dan timbulnya gangguan kamtibmas.

h) UU no 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan kaum buruh terkait dengan penghapusan outsourcing.

**c. Permasalahan**

1) Permasalahan

a) Dengan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar kurang lebih 949.741 jiwa maka ratio perbandingan dengan jumlah anggota Polri adalah 1 : 1.267, sehingga masih jauh dari perbandingan ideal Polisi dan penduduk yang mencapai 1 : 750.

b) Kesejahteraan anggota Polri yang masih rendah membuka peluang penyimpangan perilaku terhadap patuh Hukum dari anggota Polri dan penanganan kasus kejahatan.

c) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, akibat persepsi masa lalu tentang sikap dan perilaku anggota Polri yang arogan, budaya 86 dan pelayanan yang belum maksimal terhadap masyarakat.

d) Kompetensi anggota Polri belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional yang pada gilirannya dapat dirasakan keberadaan Polri di tengah – tengah masyarakat melalui pelayanan secara mudah, reponsif, tidak diskriminasi dan beresiko tinggi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif.

e) Dengan …

e) Dengan strategi pelayananan kamtibmas, digelar sebaran pelayanan sedekat – dekatnya dengan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan personel diorentasikan pada pemenuhan titik – titik sebaran pelayanan ditengah masyarakat.

f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian di wilayah Polres Karanganyar sehingga dalam melaksanakan tugas sehari – hari belum bisa maksimal.

g) Posisi strategis sebagai daerah perlintasan Propinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Magetan dengan Kecamatan Tawangmangu dapat menimbulkan kerawanan di bidang lalu lintas, tindak kriminal dan tindakan anarkis.

h) Situasi dan kondisi di sebagian Wilayah Hukum Polres Karanganyar yang tenang dan nyaman dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk bersembunyi, ini menjadi masalah yang menyulitkan karena tidak muncul gejolak yang menonjol di masyarakat.

i) Sebagai daerah kawasan industri sangat rentan terjadinya unjuk rasa karena adanya kebijakan Tenaga kerja outsourching, PHK dan tuntutan UMR yang berpotensi menimbulkan konflik unjuk rasa dan tindak kriminal.

j) Konflik internal partai berpotensi munculnya bentrokan antar pedukung.

k) Masih belum terealisasinya usulan pembangunan mako Polsek di jajaran Polres Karanganyar(Mapolsek Colomadu, Mapolsek Kebakkramat, Mapolsek Jenawi, Mapolsek Mojogedang, Mapolsek Matesih, Mapolsek Jaten, Mapolsek Gondangrejo Dan Mapolsek Jumapolo), renovasi gedung, pembangunan fasilitas perumahan, pembangunan fasilitas gudang barang bukti dan pembelian genset untuk penunjang kegiatan Polres Karanganyar..

**BAB II**…..

**BAB II**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisa SWOT sebagaimana disebutkan diatas, Polres Karanganyar menetapkan dan menjalankan visi,misi tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal,penuh dengan koodinasi dan meningkatkan sinegritas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Dengan visi,misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Polres Karanganyar menjadi semakin cerdas, mandiri, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovasi dalam menghadapi tantangan tugas.

**3. Visi**

a. Visi Polda Jawa tengah

“Terwujudnya Polda Jateng yang profesional, modern dan terpecaya”

b. Visi Polres Karanganyar

“Terwujudnya Polri Polres Karanganyar yang profesional, modern dan terpecaya”.

**4. Misi**

**a. MisiPolda Jawa Tengah**

1) Mewujudkan postur Polri Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien;

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Jateng melalui pendidikan dan latihan;

3) Memperkuat …

3) Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;

4) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;

5) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

6) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

**b. Misi Polres Karanganyar.**

1) Mewujudkan postur Polri Polres Karanganyar yang ideal, efektif dan efisien;

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Karanganyar melalui pendidikan dan latihan;

3) Memperkuat dan meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;

4) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas diwilayah hukum Polres Karanganyar dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;

5) Mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

6) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

**5. Tujuan**

**a. Tujuan Jangka Menengah Polda Jawa Tengah**

1) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah;

2) Terwujudnya …

2) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Jawa Tengah.

**b. Tujuan Jangka Menengah Polres Karanganyar**

1) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Karanganyar;

2) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Karanganyar.

**6. Sasaran Strategis**

**a. Sasaran StrategisPolda Jateng**

Mengacu kepada sasaran strategis Polri 2015-2019, maka sasaran strategis Polda Jateng 2015-2019 dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*strive for excellence*) adalah:

1) Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri;

2) Terwujudnya postur Polri Polda Jateng yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana;

3) Terpenuhinya penggelaran kekuatan Polda Jateng pada wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni sebagai poros maritim secara berkelanjutan;

4) Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polda Jateng;

5) Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng;

6) Terjalinnya …

6) Terjalinnya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Tengah secara berkelanjutan;

7) Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat;

8) Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng;

9) Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polda Jateng.

**b. Sasaran Strategis Polres Karanganyar.**

1) Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri;

2) Terwujudnya postur Polri Polres Karanganyar yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek system dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana;

3) Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar;

4) Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar;

5) Terjalinnya kemitraan Polri dengan instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar secara berkelanjutan;

6) Terpenuhinya personil Bhabinkamtibmas di setiap Desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi terhadap gangguan keamanandan gejala sosial masyarakat;

terhadap …

7) Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar;

8) Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polres Karanganyar.

**7. Pentahapan Kebijakan**

**a. Pentahapan Kebijakan Polda Jawa Tengah**

1) Tahun 2015

Meningkatkan profesionalisme SDM Polda Jateng dan kebulatan sinergi polisional yang produktif melalui pengadaan Almatsus Polri yang berbasis teknologi Kepolisian dan ilmu pengetahuan guna mewujudkan Kamtibmas yang mantap dalam memberikan pelayanan prima di masyarakat.

2) Tahun 2016

Meningkatkan profesionalisme SDM personel Polda Jateng dan kebulatansinergi polisional yangproduktif sampai pada jajaran kewilayahan terjauh melalui pengadaan Almatsus Polri yang berbasis teknologi Kepolisian dan ilmu pengetahuan guna mewujudkan Kamtibmas yang mantap dalam memberikan pelayanan prima di masyarakat.

3) Tahun 2017

Terciptanya peningkatan SDM personel Polda Jateng yang profesional dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif sampai pada jajaran kewilayahan terjauh yang didukung Almatsus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang mantap dan unggul sebagai bentuk pelayanan prima di masyarakat;

pengetahuan …

 4) Tahun 2018

Pemantapan peningkatan SDM personel Polda Jateng yang profesional dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif dan didukung kecukupan kesejahteraan personel sampai pada jajaran kewilayahan terjauh dengan memanfaatkan Almatsus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan guna mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat prima untuk mencapai Kamtibmas yang mantap serta unggul dalam rangka mendukung Mabes Polri menghadapi daya saing penguatan pertahanan nasional;

5) Tahun 2019

Terwujudnya pelayanan prima di wilayah Polda Jateng sampai pada kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan serta SDM personel Polri yang berintegritas tinggi, profesional dan proporsional serta berkualitas dengan kecukupan kesejahteraan seluruh personel guna terwujudnya Kamtibmas yang mantap dan unggul sebagai bentuk dukungan terhadap Mabes Polri dalam menghadapi daya saing penguatan pertahanan nasional.

**b. Pentahapan Kebijakan Polres Karanganyar.**

1) Tahun 2015

Meningkatkan profesionalisme SDM Polres Karanganyar dan kebulatan sinergi polisional yang produktif melalui pengadaan Almatsus Polri yang berbasis teknologi Kepolisian dan ilmu pengetahuan guna mewujudkan Kamtibmas yang mantap dalam memberikan pelayanan prima di masyarakat.

Kamtibmas …

2) Tahun 2016

Meningkatkan profesionalisme SDM personel Polres Karanganyardan kebulatan sinergi polisional yang produktif sampai pada jajaran Polsek melalui pengadaan Almatsus Polri yang berbasis teknologi Kepolisian dan ilmu pengetahuan guna mewujudkan Kamtibmas yang mantap dalam memberikan pelayanan prima di masyarakat.

3) Tahun 2017

Terciptanya peningkatan SDM personel Polres Karanganyar yang profesional dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif sampai pada jajaran Polsek yang didukung Almatsus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang mantap dan unggul sebagai bentuk pelayanan prima di masyarakat;

4) Tahun 2018

Pemantapan peningkatan SDM personel Polres Karanganyar yang profesional dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif dan didukung kecukupan kesejahteraan personel sampai pada jajaran Polsek/ 17 Polsek dengan memanfaatkan Almatsus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan guna mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat prima untuk mencapai Kamtibmas yang mantap serta unggul.

5) Tahun 2019

Terwujudnya pelayanan prima di wilayah Polres Karanganyar sampai pada Polsek Jajaran dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan serta SDM personel Polri yang berintegritas tinggi, profesional dan proporsional serta berkualitas dengan kecukupan kesejahteraan seluruh personel guna terwujudnya Kamtibmas yang mantap dan unggul sebagai bentuk dukungan terhadap Polres Karanganyar.

SDM …

**BAB III**…..

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**

**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**8. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng**

a. Sasaran Strategis**“Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**1) Membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum**melalui **Strategi** sebagai berikut ;

a) Mengusulkan pemenuhan kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri dalam rangka :

(1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan Polri dan bermitra dengan masyarakat serta kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan yang terjadi khususnya yang berpotensi terjadinya konflik serta mengarah kepada anarkis;

(2) meningkatkan profesionalisme personel Polda Jateng dalam mengantisipasi ancaman Kamtibmas yang berkenaan dengan kerawanan potensi konflik komunal, unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa serta kejahatan yang meresahkan masyarakat (*crime index*);

(3) membangun fasilitas penanganan terorisme dengan mengusulkan kebutuhan Alpalkam/Almatsus ke Mabes Polri;

(4) Terpenuhinya …

(4) terpenuhinya usulan pembangunan teknologi Kepolisian dan sistem informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi;

(5) meningkatkan pengungkapan penanganan kasus tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, kekayaan negara, transnasional dan berimplikasi kontinjensi) dan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan personel;

(6) meningkatkan pelayanan peralatan kesehatan;

(7) meningkatkan deteksi dan pencegahan gangguan Kamtibmas;

(8) meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Polri melalui pengusulan pemenuhan peralatan dan fasilitas.

b) Menyusun standar minimal Almatsus Polri, sebagai landasan usulan pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri Polda Jateng;

c) Mengoptimalkan penggunaan aset Polda Jateng melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

d) Melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului studi kelayakan;

e) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya dukungan ruang PPA pada Polsek;

f) Mengusulkan pembangunan fasilitas untuk penanganan terorisme di wilayah hukum Polda Jateng;

g) Mengusulkan …

g) Mengusulkan pembangunan dan penambahansarana dan prasarana fasilitas kantorpelayanan public(Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor) serta fasilitas pendidikandi wilayah hukum Polda Jateng.

**2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan instrument, gedung dan halaman Labfor Cabang Semarang** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengusulkan penambahan dukungan anggaran pemeliharaan dan perawatan;

b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

**3) pengembangan *Informasi Communication Technology* (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal guna meningkatkan sistem informasi criminal terpadu dengan *Criminal Justice System* (CJS) dan SKCK secara online;

b) Mengusulkan pengadaan *digital security system* melalui pengembangan pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/*Command Centre*) yang terkoneksi dengan stakeholder;

c) Mengoptimalkan *Traffic Management Center* (TMC) Polda Jateng sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan *Regional Traffic Management Center* (RTMC).

**4) membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengusulkan …

a) Mengusulkan penggelaran jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

b) Menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian;

c) Mengembangkan sistim komunikasi perkantoran berbasis Internet Protocol untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda Jateng dan satuan kerja jajaran secara efektif dan efisien;

d) Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi Kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Polda Jateng;

e) Mengusulkan pembentukan pusat layanan terintegrasi sebagai pusat layanan utama masyarakat dengan Polri (*Call* 911) di Polda Jateng, Polrestabes Semarang dan Polresta Surakarta.

b. Sasaran Strategis**“Terwujudnya postur Polri Polda Jateng yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

**1) Rekruitment personel Polda Jateng dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan *minimum zerogrowth***melalui **Strategi** sebagai berikut

a) Melaksanakan rekruitmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis yang proaktif ke masyarakat untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;

b) Menyelenggarakan rekruitmen anggota Polri di wilayah Jawa Tengah untuk mencapai *minimumzerogrowth* dengan mempertahankan jumlah personel yang ada ditambah kebutuhan pengembangan organisasi serta mempertimbangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG);

c) Rasionalisasi …

c) Rasionalisasi dan realokasi personel Polda Jateng tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;

d) Menyusun database postur Polda Jateng sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan *minimum zero growth* Polri.

**2) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan Reformasi Polri** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Melanjutkan kerjasama dengan bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi *e*-KTA;

b) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Jateng melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak khususnya dalam hal rekruitmen, seleksi pendidikan dan mutasi;

c) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);

d) Melaksanakan*assessment center* dan aplikasinya dalam rangka pembinaan karier.

**3) Meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jateng melalui pendidikan dan pelatihan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Melaksanakan kurikulum pendidikan Polri yang bersifat pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik yang terpuji serta sistem pendidikan Polri sesuai kebutuhan dan kemampuan Polda Jateng pada tahap upaya mencapai kesempurnaan (*strive for excellence*);

b) Mengikutsertakan …

b) Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri;

c) Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya dengan menunjuk *role model* anti korupsi, memasukkan kurikulum anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan;

d) Melaksanakan *e-learning* dan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);

e) Meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik (Gadik) dan Tenaga Kependidikan (Gadikan) dengan menerapkan standar kompetensi pendidik;

f) Mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi informasi.

**4) Membangun SDM Polda Jateng yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (*off campus*) di STIK-PTIK** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Memberikan kesempatan secara bertahap kepada Bintara yang berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan S1 ilmu kepolisian di STIK-PTIK;

b) Memberikan kesempatan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri.

**5) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a)Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri;

b) Mengirimkan …

b) Mengirimkan personel *assessor* pada setiap fungsi teknis Kepolisian.

**6) Mewujudkan tata kelola organisasi Polda Jateng yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;

b) Melaksanakan Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan *reward and punishment*;

c) meningkatkan integritas dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri Polda Jateng.

**7) Melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP**) melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengusulkan *Blue Print* kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara *bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda;

b) Melaksanakan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (*right size*) dan tepat masa berlakunya (*right period*);

c) Menyusun dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;

d) Mengusulkan …

d) Mengusulkan standarisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK).

**8) Menyusun peraturan Kepolisian di Polda Jateng bagi pelaksana tugas Polri di lapangan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;

b) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi terhadap peraturan Kepolisian yang berlaku di lingkungan Polda Jateng serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait;

c) Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polda Jateng.

**9) Peningkatan kesejahteraan personel Polda Jateng dalam rangka meningkatkan profesionalisme** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengusulkan peningkatan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional;

b) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan guna pelayanan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya;

c) Meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan tersedianya fasilitas kesehatan tingkat pertama di setiap Polres;

d) Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai pada Polri;

e) Merealisasikan hasil kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi personel Polri;

f) Memberikan …

f) Memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polda Jateng yang akan memasuki masa pensiun.

**10) Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;

b) Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik Rutin, Wasrik Khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;

c) Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;

d) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Jateng melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

e) Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara *online*.

**c.** Sasaran Strategis **“Terpenuhinya penggelaran kekuatan Polda Jateng pada wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni sebagai poros maritim secara berkelanjutan”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**1)** **Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi Polri** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengirimkan usulan berkaitan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polri;

b) Mengirimkan usulan berkaitan revisi Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri;

c) Mengirimkan usulan berkaitan revisi Perkap Nomor 22 Tahun

2010 …

 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pada Tingkat Polda dan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pada Tingkat Polres dan Polsek.

**2) Peningkatan pengamanan perbatasan melalui penggelaran personel dan pos pengamanan pulau terluar berpenghuni/ berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan personel Polda Jateng untuk mengamankan wilayah perairan pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat Polda maupun jajaran;

b) Peningkatan pengamanan perbatasan melalui menambah jumlah personel di daerah perbatasan dan pulau terluar perpenghuni, minimal 60% dari DSP;

c) mengusulkan peningkatan status Polsubsektor Nusakambangan menjadi Polsek Nusakambangan;

d) mengusulkan pembangunan Mako Polsek/Polsubsektor khususnya di wilayah pemekaran, perbatasan dan pulau luar berpenghuni secara bertahap, khususnya Mako yang direncanakan untuk Polsubsektor Kampung Laut;

e) mengusulkan pembangunan Pos-Pos pengamanan untuk wilayah pemekaran, perbatasan dan pulau luar berpenghuni secara bertahap;

f) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemerintah Daerah;

g) Mengusulkan penambahan kapal tipe C1 secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri;

h) Meningkatkan …

h) Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polair yang mengawaki kapal melalui pendidikan dan pelatihan;

i) Meningkatkan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal;

j) Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek kawasan pelabuhan dan Satpolair Polres.

**d.** Sasaran Strategis **“Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polda Jateng”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**1) Optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins

b) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada Sentra Pelayanan Kepolisian;

c) Mengusulkan pembangunan Gedung RPK Polrestabes Semarang;

d) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

e) Meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: (1) penggelaran Satpas online; (2) penggelaran sistem STNK online; (3) penggelaran sistem BPKB online;

f) Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api nonorganik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;

g) Mendorong …

g) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;

**2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Personel Polda Jateng dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;

b) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder*s terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);

c) Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

d) Mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif.

**3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Jawa Tengah terhadap penciptaan rasa aman masyarakat** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

b) Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal) baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;

c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.

**4) Mempersiapkan …**

**4) Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilukada;

b) Menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

**e.** Sasaran Strategis **“meningkatnyaperan intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak social** melalui **Strategi** sebagai berikut :

1) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polda Jateng yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai;

2) Membangun sistem pelayanan secara *online* dalam rangka penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;

3) Membangun daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk disharmoni sosial.

**f.** Sasaran …

**f.** Sasaran Strategis **“terjalinnya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Tengah secara berkelanjutan”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**1)** **Mengoptimalkan sinergi polisional dengan masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Tengah** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/badan terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;

b) Meningkatkan kerja sama antaraparat penegak hukum di wilayah hukum Jawa Tengah;

c) Meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) khususnya terhadap warganegara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

**2) Meningkatkan partisipasi Polda Jateng dalam mengirimkan personel untuk menjaga perdamaian dunia** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b) Melakukan seleksi calon *Formed Police Unit (FPU)* dan *Individual Police Officer (IPO)* melalui mekanisme secara transparan.

**g.** Sasaran Strategis **“Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas** melalui **Strategi** sebagai berikut :

1) Menguatkan …

1) Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu Desa/Kelurahan, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas;

2) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim hingga menyentuh daerah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni;

4) Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;

5) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;

6) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;

7) Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.

**h.** Sasaran Strategis **“Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng”** dicapai dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut:

1) **Meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I)** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengembangkan RTMC dan TMC yang terintegrasi;

b) Memantapkan …

b) Memantapkan sistem *online* data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

c) Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dan *black spot* dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

**2) Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Melakukan kajian *black spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

b) Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis;

c) Melaksanakan program *road safety/safety ridding*.

**3) Membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-educasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

b) Menggelar operasi Kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;

c) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013).

**i.** Sasaran Strategis **“Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polda Jateng”** dicapai dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut:

**1) Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya** melalui **Strategi** sebagai berikut :

**kejahatan** …

a) Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas;

b) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnational (*cyber crime*, narkoba, *human trafficking*, *arms smuggling*, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis);

c) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;

d) Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar *scientific criminal investigation*;

e) Mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (*illegal logging)*, pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan liar (*illegal mining*), kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;

f) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polri yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya;

Badan …

g) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Polri bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait;

h) Guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

**2) Membangun kemampuan *back up* operasional di tingkat Polda dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (*FlashPoint*) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik social** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana cepat, baik udara, laut maupun darat;

b) Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat;

c) Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi).

**3) Membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (*Scientific Criminal Investigation-SCI)* dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara *(Crime Scene Investigation-CSI)* guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;

b) Meningkatkan …

b) Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah *(Scientific Criminal Investigation-SCI).*

**9. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Karanganyar**

**a.** Sasaran strategis **“Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

**1) Membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakkan hukum** melalui **strategi** sebagai berikut:

a)Mengusulkan pemenuhan kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri dalam rangka :

(1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan Polri dan bermitra dengan masyarakat serta kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan yang terjadi khususnya yang berpotensi terjadinya konflik serta mengarah kepada anarkhis;

(2) meningkatkan profesionalisme personil Polres Karanganyar dalam mengantisipasi ancaman Kamtibmas yang berkenaan dengan kerawanan potensi konflik komunal, unjuk rasa anarkhis dan kerusuhan massa serta kejahatan yang meresahkan masyarakat (*crime index*);

(3) membangun fasilitas penanganan terorisme dengan mengusulkan kebutuhan Alpalkam/ Almatsus ke Polda Jateng;

(4) terpenuhinya …

(4) terpenuhinya usulan pembangunan teknologi Kepolisian dan sistem informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi;

(5) meningkatkan pengungkapan penanganan kasus tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, kekayaan Negara, transnasional dan berimplikasi kontijensi) dan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan personil;

(6) meningkatkan pelayanan peralatan kesehatan;

(7) meningkatkan deteksi dan pencegahan gangguan Kamtibmas;

(8) meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Polri melalui pengusulan pemenuhan peralatan dan fasilitas.

b) Menyusun standar minimal Almatsus Polri, sebagai landasan usulan pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri Polres Karanganyar;

c) Mengoptimalkan penggunaan aset Polres Karanganyar melalui Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

d) Melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului studi kelayakan;

e) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya dukungan ruang PPA pada Polsek;

f) Mengusulkan pembangunan fasilitas untuk penanganan terorisme di wilayah hukum Polres Karanganyar;

g) Mengusulkan …

g) Mengusulkan pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana fasilitas kantor pelayanan publik (Polres dan Polsek) serta fasilitas pendidikan di wilayah hukum Polres Karanganyar.

**2) pengembangan *Informasi Communication Technology* (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat**  melalui **strategi** sebagai berikut:

a) Meningkatkan kerjasama pengembangan secara teknis dengan kementrian/lembaga terkait melalui pemanfaatan database informasi criminal guna meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dengan *Criminal Justice System* (CJS) dan SKCK secara online;

b) Mengusulkan pengadaan *digital security system* melalui pengembangan pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/*Command Center*) yang terkoneksi dengan stakeholder;

c) Mengoptimalkan *Traffic Management Center* (TMC) Polres Karanganyar sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait.

**3) membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polres sampai dengan Polsek**  melalui **strategi** sebagai berikut:

1) Mengusulkan penggelaran jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

2) Menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian;

3) Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis internet protocol untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polres Karanganyar dan satuan kerja jajaran secara efektif dan efisien;

4) Mengembangkan …

4) Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Polres Karanganyar;

**b.** Sasaran strategis **“Terwujudnya Postur Polri Polres Karanganyar yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

**1) Sosialisasi rekruitment personil Polres Karanganyar dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan *minimum zero growth*** melalui  **strategi** sebagai berikut:

a) Melaksanakan sosialisasi rekruitmen dengan prinsip Bersih, Transparan, akuntabel dan Humanis yang proaktif ke masyarakat untk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;

b) Menyelenggarakan Sosialisasi rekruitmen anggota Polri di wilayah Karanganyar untuk mencapai program *minimum zerogrowth* dengan mempertahankan jumlah personel yang ada ditambah kebutuhan pengembangan organisasi serta mempertimbangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG);

c) Rasionalisasi dan realokasi personel Polres Karanganyar tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;

d) Menyusun database postur Polres Karanganyar sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan *minimum zero growth* Polri.

**2) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan Reformasi Polri** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Melanjutkan kerjasama dengan bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi *e*-KTA;

b) Melakukan …

b) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres Karanganyar melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak khususnya dalam hal seleksi pendidikan dan mutasi;

c) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;

d) Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakandalam rangka sistem pembinaan karier.

**3) Meningkatkan profesionalisme anggota Polres Karanganyar melalui pendidikan dan pelatihan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Melaksanakan pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian untuk meningkatkan kemampuan SDM anggota Polres Karanganyar;

b) Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri;

c) Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya dengan menunjuk *role model* anti korupsi.

**4) Mewujudkan tata kelola organisasi Polres Karanganyar yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;

b) Meningkatkan integritas dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri Polres Karanganyar.

**5) Melanjutkan …**

**5) Melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dan Polres dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP**) melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengusulkan *Blue Print* kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara *bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres;

b) Melaksanakan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (*right size*) dan tepat masa berlakunya (*right period*);

c) Menyusun dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;

d) Mengusulkan standarisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK).

**6) Mengkompulir peraturan Kepolisian di Polres bagi pelaksana tugas Polri di lapangan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;

b) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi terhadap peraturan Kepolisian yang berlaku di lingkungan Polres Karanganyar serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait;

c) Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres Karanganyar.

**7) Peningkatan …**

**7) Peningkatan kesejahteraan personel Polres Karanganyar dalam rangka meningkatkan profesionalisme** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengusulkan peningkatan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional;

b) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan guna pelayanan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya;

c) Meningkatkan fasilitas kesehatan dan tersedianya fasilitas kesehatan tingkat pertama di setiap Polres;

d) Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai pada Polri;

e) Melaksanakan pengusulan pemberian keterampilan khusus kepada Polri dan ASN Polres Karanganyar yang akan memasuki masa pensiun ke Polda Jateng.

**8) Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;

b) Mengefektifkan pelaksanaan pendampingan Wasrik dan supervise ke fungsi dan Polsek;

c) Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;

d) Meningkatkan …

d) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Karanganyar melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

e) Memperbaiki sistem komplain masyarakat.

**c.** Sasaran Strategis **“Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**1) Optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;

b) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada Sentra Pelayanan Kepolisian;

c) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

d) Meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: (1) penggelaran Satpas online; (2) penggelaran sistem STNK online; (3) penggelaran sistem BPKB online;

e) Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK dan perizinan / pemberitahuan kegiatan masyarakat;

f) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat.

**2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan …

a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Personel Polres Karanganyar dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;

b) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder*s terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);

c) Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

d) Mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif.

**3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Karanganyar terhadap penciptaan rasa aman masyarakat** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

b) Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal) baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;

c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.

**4) Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan …

a) Meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilukada;

b) Menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

**d.** Sasaran Strategis **“meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial** melalui **Strategi** sebagai berikut :

1) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polres Karanganyar yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai;

2) Membangun sistem pelayanan secara *online* dalam rangka penerbitan SKCK;

3) Membangun daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk disharmoni sosial.

**e.** Sasaran Strategis **“terjalinnya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar secara berkelanjutan”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**1) Mengoptimalkan sinergi polisional dengan masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan …

a) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/badan terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;

b) Meningkatkan kerja sama antaraparat penegak hukum di wilayah hukum Karanganyar.

**2) Meningkatkan partisipasi Polres Karanganyar dalam mengirimkan personel untuk menjaga perdamaian dunia** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b) Mengajukan calon *Formed Police Unit (FPU )*dan *Individual Police Officer (IPO)* untuk mengikuti seleksimelalui mekanisme secara transparan.

**f.** Sasaran Strategis **“Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas** melalui **Strategi** sebagai berikut :

1) Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi(Bhabinkamtibmas) satu Desa/Kelurahan, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas;

2) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

3) Meningkatkan …

3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas;

4) Meningkatkan kemampuan penanganan radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;

5) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;

6) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;

7) Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.

**g.** Sasaran Strategis **“Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum polres Karanganyar”** dicapai dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut:

**1)** **Meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I)** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Mengembangkan TMC yang terintegrasi;

b) Memantapkan sistem *online* data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

c) Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dan *black spot* dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

**2)** **Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Melakukan …

a) Melakukan kajian *black spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

b) Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis;

c) Melaksanakan program *road safety/safety ridding*.

**3)** **Membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Membangun sistem edukasi berbasis teknologi (*e-educasi*) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

b) Menggelar operasi Kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;

c) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013).

**h.** Sasaran Strategis **“Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polres Karanganyar”** dicapai dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut:

**1) Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas;

b) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnational (*cyber crime*, narkoba, *human trafficking*, *arms smuggling*, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis);

*trafficking* …

c) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;

d) Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar *scientific criminal investigation*;

e) Mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (*illegal logging)*, kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;

f) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polri yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya;

g) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Polri bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait.

h) Guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

**2) Membangun kemampuan *back up* operasional di tingkat Polres dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (*Flash Point*) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik sosial** melalui **Strategi** sebagai berikut :

***(Flash …***

a) Mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada masing-masing Fungsi dan Polsek untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana cepat;

b) Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana;

c) Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi).

**3) Membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (*Scientific Criminal Investigation-SCI)* dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek** melalui **Strategi** sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara *(Crime Scene Investigation-CSI)* guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;

b) Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah *(Scientific Criminal Investigation-SCI).*

**10. Kerangka Regulasi**

Polres Karanganyar dalam menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat,karena tugas dan wewenang Polri yng diemban berkaitan dengan kepentinganmasyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Capaian Polres Karanganyar selama tahun 2010-2014 dibidang legislasi telah berhasil menyusun dan menetapkan Peraturan Kapolres Karanganyar

sebanyak …

Sebanyak 3 ( tiga ) Perkap, Peraturan Kapolres tersebut dibuat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang mengatur dan mengikat bagi internal Polri maupun masyarakat dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional.

Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Polres Karanganyar dari tahun 2011 s.d 2014 sebanyak 72 ( tujuh puluh dua ) SOP, sedangkan untuk MoU dari tahun 2010 sampai 2014 sebanyak 41 ( empat puluh satu ).

Kerangka regulasi dalam Renstra Polri tahun 2015-2019 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Dari isu strategis di bidang pertahanan dan keamanan terhadap peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas, antara lain:

1. Pemenuhan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan. Kebutuhan regulasi yang dibuat antara lain: Perkap tentang pemenuhan Almatsus Polri dengan menitikberatkan pada industri pertahanan lokal, Perkap tentang pengadaan barang/jasa Almatsus Polri;
2. Peningkatan Kesejahteraan dalam rangka Pemeliharaan Profesionalisme Personel Polri. Disamping peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Kebutuhan regulasi yang diperlukan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang administrasi keanggotaan Polri;
3. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri.Kebutuhan regulasi yang dibuat adalah amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah disahkannya revisi KUHP dan KUHAP;
4. Penguatan Intelijen. Kebutuhan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah adalah Undang-Undang Tentang Persandian sebagai payung hukum operasional sistem persandian, Polri membutuhkan regulasi pembentukan Undang-Undang tentang senjata api dan bahan peledak;

e. Penguatan …

1. Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba. Kebutuhan regulasi yang dibuat pemerintah antara lain Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan P4GN Tahun 2011-2015, Polri membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Kapolri dalam rangka pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.

**Kerangka Regulasi**

| **No** | **Sasaran Strategis** | **Regulasi Terkait Yang Sudah Ada** | **Kebutuhan Regulasi** | **Ket** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri | * + - * Perpres 54 Th 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 35 th 2011 dan Perpres 70 th 2011
 | - Perkap tentang Almatsus |  |
| 2. | Terwujudnya postur Polri Polres Karanganyar yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek system dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana; | * UU No.17 tahun 2003
* ,UU No. 1 tahun 2004
* ,PP No. 8 Tahun 2006,
* Perpres No. 29 tahun 2014
* Permenpan RB No. 53 Tahun 2914
* PP No. 60 tahun 2008 dan
* Perkap No. 2 Tahun 2913
* Permen Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 10 Tahun 2011
* Permen No. 53 Tahun 2015 tentang perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja
* Skep No. 977/XII/2014 Pedoman Adm Binkar Anggota Polri.
* ST No. 2330/XI/2011 Tentang Akselerasi Pelatihan Perubahan *Mind set* dan *Cultur Set* Polri pada Satker/Satwil
* Surat Kesepahaman Bersama (MoU) antara PT Arga Bangunan Bangsa (ESQ) dengan Kapolri No. 16/ABB-LD/MOU/VI/2011 Tentang Sinergi Transpotasi *Mind set* dan *Cultur set*
* Surat Kalemdiklatpol No.B/642/III/2012 Tentang Pelatihan Perubahan *Mind set* dan *Cultur Set* dan 11 Polda
* Kep. Kapolri No.346/VI tentang Pengesahan Road Map RBP
* Perkap No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Diklat Polri
* Perkap No. 20 Tahun 20 tahun 2007 tentang Struktur Komponen Pendidikan di lingkungan Polri
* Permen PAN dan RB No. 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
* Keputusan Kapolri No. 998/XII/2014 taggal 16 Desember tentang Prodik Polri
* Keputusan Kapolri No.1000/Xii/2014 tentang Program Pelatihan TA 2015
 | * + - * Perkap tentang Manajemen Perubahan di lingkungan Polri
 |  |
| 3. | Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar; | * Perkap No.18 tahun 2011 tentang Pengawasan dan pemeriksaan rutin
* Perkap No 1 Tahun 2014 tentang Verifikasi
* Perkap No 1 Tahun 2008 tentang wasrik umum
* Perkap No 2 Tahun 2012 tentang pengaduan masyarakat
* Juklap Kapolri No. Juklap/02/XII/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
* Perkap no 2 tahun 2008 pengawasan ,pengendalian dan Pengamanan bahan peledak komersial
* Perkap No 7 Tahun 2012 tentang tata cara Penerbitan Surat Keterangan cacatan Kepolisian
* UUNo 2 Tahun 2002
* Perkap No.12 Tahun Tentang Panduan Penyusunan nota kesepahaman /MOU
* Commander Wish Kapolri Tanggal 15 April 2015
* Kepres No.63 /2004 tentang Pam Obvitnas
* Perkap No.Skep/738/X//2005 tentang Pedoman sistem Pamobvitnas
* Perkap/248/2004 tentang Pam VIP
* Juklak Kapolri No.Juklap 02/XII/1995 tentang Perijinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
* Perkap No 2 tahun 2008 tentang Pengawasan pengendalian dan Pengamanan bahan peledak Komersial
* Perkap no 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Perkap No.18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan cacatan Kepolisian
* Perkap No. Tahun 9 tahun 2009 tentang sistem Operasional Polri
* Perkap No.9 tahun 2009 tahun 2011 tentang Menejemen operasional Polri
* Perkap tentang Anti Teror
* Perkap Tentang jihandak
* Perkap tentang anti anarkis
* Perkap tentang PHH
* Perkap No 16 Tahun 2006
* Perkap No 1 Tahun 1 Tahun 2009
* Perkap No 17 Tahun 2009
 | * + - * Perkap tentang pengendalianmutu pengawasan dan pemriksan
			* Perkap tentang Pengendalian mutu wasrik umum
			* Perkap tentang pengendalian mutu Verivikasi
			* Perkap tentang perijinan dan pembentukan kegiatan masyaratan
			* Peraturan tentang pengamanam markas
			* Peraturan tentang Penanganan Senjata KBR(,Biologi kimia dan Radio Aktif )
			* Perkap tentang Pedoman pengendalian massa
			* Perkap tentang penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian
			* Perkap tentang Manajemen penanggulangan Bencana
 |  |
| 4. | Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar | * Intruksi Kapolri No.01/II/1997 tentang kewajiban pembuatan laporan informasi sebagai tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas
* Perkabik No.2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan produk Intelijen di lingkungan intelijen Polri
* Perkabik No.1 tahun 2013 tentang penyelidikan Intelijen Polri
* Perkabik No. 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Polri
* Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang penggalangan Intelijen Polri
* Perkabik No 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen Keamanan Polri
 | * Perkap tentang kewajiban membuat lap. Informasi bagi seluruh anggota Polri
 |  |
| 5. | Terjalinnya kemitraan Polri dengan intansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar secara berkelanjutan | * + - * Perkap No. 12 tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerma
			* Perkap No.1Tahun 2013 Penugasan Anggota Polri di luar Struktur Organisasi Polri
			* Perkap No.13 Tahun Tahun 2014 Tentang Penugasan anggt Polri di Luar Struktur Organisasi
			* Perkap No.16 tahun 2012 tentang mutasi pers
			* UU Nomer 40 Tahun 1999 tentang pers
			* UU Nomer 14 Tahun 2006 tentang keterbukaan informasi publik
			* Perkap No.16 tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi Publik dilingkungan Polri
			* Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
			* Perkap Nomer No 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manejemen Pengamanan
			* Perkap No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam tugas Polri
			* Perkap Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 | * Perkap tentang Kewartawanan
 |  |
| 6. | Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat. | * Perkap No 7 tahun 2008 tentang Bhabinkantibmas
* Skep Kapolri No. Skep 7371//X/2005 tentang bhabinkantibmas
 |  |  |
| 7. | Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar | * + - * UU No.8 TH 1981 tentang KUHAP
			* UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri
			* UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
			* PERKAP no 15 Tentang Tata cara Penanganan Lalu lintas Intruksi Presiden Ri NO.4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
			* PP No.80 Tahun 2012 Tentang tata cara Pemeriksaan ranmor di jalan dan penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
			* Perkap No.10 Tahun 2012 tentang penga-turan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas
			* UU No. 22 Tahun 2009 PS 208 ayat 2 tentang giat Dikmas Lantas
			* Juklak Kapolri no. 05 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Dikmas Lantas
			* PP No 55 tahun 2012 tentang kendaraan
			* UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan
			* Permenhub No. 49 tahun 2014 Tentang APIL
			* PP No.43 Tahun 2013 tentang jalan tol
			* Permenhub no.13 Tahun 2014 tentang Rambu
			* Permenhub no.34 Tahun 2014 tentang marka
			* Juklak Kapolri No. 05 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dikmas Lantas
			* Perpres RI No.5 Tahun 2015 Tentang Peyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
			* Perkap No.9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi
			* Perkap NO. 9 Tahun 2012 Regristasi dan Identifikasi kendaraan bermotor
			* Perkap No.24 Tahun 2007 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi Lembaga Pemerintah
 | * Perkap Sim
* Perkap tentang Regident Ranmor
* Perkap Gun Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
* Perkap gunaan lampu Rotator dan Sirine
* Perkap penanganan kecelakaan lalu lintas
* Perkap Program Nasional Keamanan LLAJ
* SOP yan sim
* SOP Sim *Corner/Geral*
* SOP Sim keliling
* SOP Sim komonitas
* SOP Yan STNK
* SOP Samsat *Corner*
* SOP Samsat Keliling
* SOP Samsat *Drive Thrue*
* SOP *On Line*
* SOP BPKB *Delivery*
* SOP BPKB
* SOP *ONE LINE*
* SOP Yan Penanganan Gar Lantas
* SOP Yan Penanganan Laka Lantas
* SOP Yan Turwali
* SOP Yan Info Lantas
* SOP Yan RSPA
* SOP Satuan Wilayah Terkait Yan Lantas
 |  |
| 8. | Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polres Karanganyar.  | * KUHP
* KUHAP
* UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan anak
* UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
* UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
* UU No.8 Tahun 2010 Tentang pencegagaan dan peberantasan Tindak Pindana Pencucian Uang
* UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
* UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan
* PP No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
* Perkap 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikkan Tindak Pidana
* Perkap No. 1 Tahun 2014 tentang SOPPerencanaan penyidikan Tindak Pidana
* Perkaba Nomer 2 Tahun 2014 tentang Pengorganisasian Peyidikan Tindak Pindana
* Perkaba Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peyidikan Tindak Pidana
* Perkaba No 4 Tahun 20014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
* UU TIPIKOR
* UU lain yang berkaitan dengan tindak Pidana Khusus (UU Lex Spesialis)
* Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri
* Pasal 114 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
* Didukung adanya Perkaba 1,2,3 & 4
* Juklap Kapolri No 2 tahun 1995 tentang Perijinan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan )
 | * SOP yang ditetapkan Ditreskrimum yang berkaitan dalam pelaksanaan Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Umum
* SOP yang ditetapkan Ditreskrimsus berkaitan pelaksaan Penyidikan dan penyelidikan Tindak Pidana khusus
* BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
* Imigrasi
* BNN (badan Narkotika Nasional)
* OJK (Otoritas jasa keuangan)
* BNP2TKI (badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
* BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
 | Karanganyar, April 2015KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANRMAHEDI SURINDRA, S.H., S.I.K.AKBP NRP 73040546 |

**11. Kerangka kelembagaan**

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi.Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan Polri tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebihmengefektifkandan mengefisiensikan kinerjapersonel Polri.Upaya penyederhanaan organisasi Polri perlu dilakukan sesuai kebutuhan Polri dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran.Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polri.

Sesuai …

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan :

1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
2. Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisen, transparan dan sinergis (*well-connected governance system*);
3. Profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polri.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polri dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat.Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;

c. Prinsip …

1. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti transparansi,efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Karanganyar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

* 1. Polres Karanganyar telah melaksanakan pembenahan/usulan perbaikan kelembagaan organisasi Polri untuk perbaikan kinerja Polri diantaranya adalah masukan/usulan peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Kapolri Nomor 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres dan Polsek antara lain :

1) Subbaghumas pada Bagops menjadi Sihumas berdiri sendiri, jabatan PA Siaga dihapus;

2) Penambahan Subbagstrajemen dan RBP pada Bagren;

3) Subbagsarpras menjadi Subbaglog berdiri sendiri, Subbagkum berdiri sendiri, perubahan nomenklatur Bagsumda menjadi Bag SDM, Perubahan nomenklatur Silog menjadi Baglog;

4) Peningkatan struktur Siwas menjadi Bagsiwas;

5) Peningkatan struktur Sipropam menjadi Bagpropam;

6) Pembentukan struktur Urwassidik pada Satreskrimum dan Satresnarkoba;

7) Pembentukan struktur Satreskrimsus, penambahan struktur Urwassidik;

8) Pembentukan struktur Unit Satwa pada Satsabhara;

9) Perubahan nomenklatur Unit Laka menjadi Unit Gakkum;

10) Pembentukan struktur Unit Pamtah (pengamanan tahanan) diemban langsung oleh Sattahti;

11) Subbagkum berdiri sendiri tidak dibawah Bagsumda;

12) Sikum dan Sihumaspada Polsek Urban dihapus;

13) Wakapolsek …

13) Wakapolsek dan Sihumas pada Polsek Rural dihapus;

14) Unit Reskrim dan Intelkam digabung menjadi Unit Resintel pada Polsek Prarural.

b. Penguatan Satuan Kewilayahan Polri disesuaikan dengan perkembangan administrasi Pemerintahan Daerah Karanganyar :

1) Peningkatan type Polsek Rural menjadin Urban: Polsek Colomadu, Polsek Jaten, dan Polsek Karangnanyar.

2) Pembangunan Barak Dalmas Polres Karanganyar;

3) Pembangunan Mako: Polres Karanganyar, Polsek Colomadu, Kebakkramat, Jenawi, Mojogedang, Matesih Jaten dan Jumapolo;

4) Pembangunan Satpas SIM pada Polres Karanganyar;

5) Pembangunan fasilitas perumahan dinas bagi personil Polres Karanganyar;

6) Pembangunan fasilitas gudang barang bukti;

7) Peningkatan tipe Polsek : Colomadu, Jaten dan Karanganyar.

c. Mengusulkan pembentukann unit Lantas : Polsek Colomadu, Polsek Gondangrejo, Polsek Jaten dan Polsek Karangpandan;

d. Mengusulkan pengadaan Alpakam / Almatsus Polri guna mendukung Tupoksi Polres Karanganyar dan Pengamanan Kesatuan Polres Karanganyar berupa :

 1) Almatsus berupa Mobil APC, AWC, dan Security Barrier;

 2) Alpakam berupa Peralatan Dalmas.

e. Mengusulkan pengadaan peralatan pendukung pelayanan kepolisian, antara lain scanner, Alsintor Intelkam dan genset Polres;

f. Melaksanakan …

f. Melaksanakan Pengkajian Komposisi Personel Polres Karanganyar dan Polsek Jajaran;

g. Penyusunan peraturan Kapolres Karanganyar tentang pokok-pokok HTCK dilingkungan Polres Karanganyar dan Polsek Jajaran.

h. Melaksanakan Evaluasi komposisi personel Polres Karanganyar dan Polsek Jajaran ditinaju dari DSPP, Riil, dan Analisis Beban Kerja (ABK).

**Kerangka Kelembagaan**

| **No** | **Sasaran Strategis** | **Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada** | **Kerangka Kelembagaan** | **Ket** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri | a. Subbag Sarprasb. Sitipolc. Bagren | a. Penguatan fungsi Sarprasb. Penguatan fungsi Bid TIc. Penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait |  |
| 2. | Terwujudnya posturPolri Polda Jateng yang efektif, bermoral,profesional, modern, dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. | a. Sumdab. Siwasc. Bagrend. Sipropame. Subbaghumas | a. Penguatan fungsi SDMb. Penguatan fungsi Siwasc. Penguatan fungsi Bagrend. Penguatan fungsi kehumasan |  |
| 3. | Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar. | a. Satlantasb. Satbinmasc. Subbag Hukumd. Bagsumdae. Subbag Sarprasf. Satsabharag. Satintelkamh. Satreskrim | a. Penguatan fungsi Lantasb. penguatan fungsi Binmasc. penguatan fungsi Hukumd. penguatan fungsi SDMe. penguatan fungsi Sarprasf. penguatan fungsi Sabharag. Penguatan fungsi Intelkamh. Penguatan fungsi Reskrim |  |
| 4. | Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar | Satintelkam | Penguatan fungsi Intelkam |  |
| 5. | Terjalinnya kemitraan Polri dengan intansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar secara berkelanjutan | a. Binmasb. Bagopsc. Subbag Hukumd. Persatuan wartawan Indonesia Karanganyare. Komisi Informasi Publik Kabupaten Karanganyar | a. Penguatan fungsi Binmasb. Penguatan fungsi Bagopsc. Penguatan fungsi Hukumd. Penguatan fungsi humas |  |
| 6. | Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat. | a. Satbinmasb. Pokdar Kantibmasc. Kelompok FKPPM |  Penguatan fungsi Satbinmas |  |
| 7. | Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar | a. Satlantasb. Unit Lantas | a. Penguatan fungsi pencegahan dan rekayasa lalu lintas sampai dengan tingkat Polsekb. Penguatan fungsi penegakan hukum di bidang lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek |  |
| 8. | Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polres Karanganyar.  | a. Satreskrimb. Satnarkobac. Unit Reskrimd. Satintelkam | a. Penguatan fungsi penyelidikan dari tingkat Polres sampai tingkat Polsekb. Penguatan pengawasan penyidikan pada tingkat Polres dan Polsekc. Penguatan koordinasi dengan criminal justice system (CJS)d. Penguatan fungsi lidik sidik |  |

**BAB IV**…..

**BAB IV**

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**12. Target Kinerja**

**TABEL SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET**

| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | **KET** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi | a. Persentase realisasi usulan penambahan Almatsus/ Alpalkam Polres Karanganyar dari berbagai jenis pembiayaan  |  |  |  | 30 % | 35 % |  |
| b. Persentase capaian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Almatsus/ Alpalkam Polres Karanganyar  |  |  |  | 30 % | 35 % |  |
| 2 | Terwujudnya postur Polri Polres karanganyar yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana | a. Persentase personel Polres Karanganyar yang memiliki standar kompetensi sesuai hasil *assessment*  |  |  |  | 24 % | 29 % |  |
| b. Persentase personel yang ditempatkan sesuai kompetensinya  |  |  |  | 50 % | 52 % |  |
| c. Persentase penempatan personel sesuai kualifikasi program Diklat peningkatan kemampuan  |  |  |  | 70 % | 80 % |  |
| d. Persentase penurunan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika profesi  |  |  |  | 2 % | 2 % |  |
| e. Persentase peningkatan anggaran operasional belanja barang dan belanja modal Polres Karanganyar  |  |  |  | 5 % | 5 % |  |
| 3. | Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar | a. Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri  |  |  |  | 75 % | 80 % |  |
| b. Persentase peningkatan penggunaan jasa Poliklinik Polri Polres Karanganyar oleh masyarakat  |  |  |  | 40 % | 45 % |  |
| c. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri  |  |  |  | 60 % | 65 % |  |
| 4. | Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar | a. Persentase informasi intelijen yang didistribusikan ke fungsi Kepolisian lainnya.  |  |  |  | 40 % | 45 % |  |
| b. Persentase informasi intelijen yang dapat di distribusikan ke lintas sektoral  |  |  |  | 45 % | 50 % |  |
| 5. | Terjalinnya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar secara berkelanjutan | a. Persentase capaian pelaksanaan kerja sama (MoU) Polres Karanganyar dengan instansi pemerintahan  |  |  |  | 60 % | 65 % |  |
| b. Persentase capaian pelaksanaan kerja sama (MoU) Polres Karanganyar dengan lembaga  |  |  |  | 60 % | 65 % |  |
| 6. | Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat | a. Persentase Bhabinkamtib-mas yang tergelar di Desa/kelurahan secara Proporsional;  |  |  |  | 45 % | 50 % |  |
| b. Persentase capaian penyelesaian masalah oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka mendukung terciptanya Harkamtibmas. |  |  |  | 25 % | 30 % |  |
| 7. | Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar | a. Persentase peningkatan penindakan terhadap 12 sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas  |  |  |  | 5 % | 8 % |  |
| b. Persentase penurunan jumlah laka lantas  |  |  |  | 1 % | 1 % |  |
| c. Persentase penurunan tingkat fatalitas korban laka lantas meninggal dunia  |  |  |  | 1 % | 1 % |  |
| d. Persentase penyelesaian kasus laka lantas  |  |  |  | 30 % | 35 % |  |
| 8. | Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah Polres Karanganyar | a. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana Umum  |  |  |  | 60 % | 65 % |  |
| b. Persentase penyelesaian kasusKorupsi |  |  |  | 75 % | 80 % |  |
| c. Persentase penyelesaian kasusNarkoba |  |  |  | 80 % | 82 % |  |

**13. Kerangka Pendanaan**

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis di wilayah hukum Polres Karanganyar bidang pertahanan dan keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpalkam/AlmatsusPolres Karanganyardan peningkatan Profesionalisme personel Polres Karanganyar.

**KERANGKA …**

**KERANGKA PENDANAAN**

| **No** | **Sasaran Strategis** | **Keluaran** | **Sumber Pendanaan** | **Pelaksana** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Terpenuhinya sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian yang modern guna mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri | 1) terpenuhinya kebutuhan minimal Alpalkam/Almatsus Polri Polres Karanganyar;2) menetapkan standarisasi perlengkapan Polri pada kesatuan Polres Karanganyar;3) menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan LPSE yang didahului studi kelayakan | **RM****PNBP** |  |
| **2.** | Terwujudnya postur Polri Polres Karanganyar yang efektif, bermoral, profesional, modern dan terpercaya pada aspek system dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana; | 1) melaksanakan sosialisasi yang proaktif ke masyarakat dalam rangka rekruitmen untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;2) menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka rekruitmen anggota Polri untuk mencapai minimum *zero growth* dengan mempertahankan jumlah personel yang ada ditambah kebutuhan pengembangan organisasi serta mempertimbangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG);3) rasionalisasi dan realokasi personel Polres Karanganyar ke Bag/Sat/Si tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;4) pengusulan penambahan jumlah PNS Polres Karanganyar dari sumber umum selama lima tahun;5) membantu menyusun data base postur Polres Karanganyar sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimum *zero growth* Polri.6) melanjutkan kerjasama dengan bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-KTA;7) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres Karanganyar melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak khususnya dalam hal seleksi pendidikan dan mutasi;8) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;9) Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakandalam rangka sistem pembinaan karier.10) Melaksanakan pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian untuk meningkatkan kemampuan SDM anggota Polres Karanganyar;11) Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri;12) Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya dengan menunjuk *role model* anti korupsi.13) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;14) Meningkatkan integritas dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri Polres Karanganyar.15) Mengusulkan *Blue Print* kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara *bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres;16) Melaksanakan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (*right size*) dan tepat masa berlakunya (*right period*);17) Menyusun dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;18) Mengusulkan standarisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK).19) Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;20) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi terhadap peraturan Kepolisian yang berlaku di lingkungan Polres Karanganyar serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait;21) Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres Karanganyar.22) Mengusulkan peningkatan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional;23) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan guna pelayanan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya;24) Meningkatkan fasilitas kesehatan dan tersedianya fasilitas kesehatan tingkat pertama di setiap Polres;25) Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai pada Polri;26) Melaksanakan pengusulan pemberian keterampilan khusus kepada Polri dan ASN Polres Karanganyar yang akan memasuki masa pensiun ke Polda Jateng.27) Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;28) Mengefektifkan pelaksanaan pendampingan Wasrik dan supervise ke fungsi dan Polsek;29) Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;30) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Karanganyar melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;31) Memperbaiki sistem komplain masyarakat. | **RM****PNBP** |  |
| **3.** | Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar | 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;2) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada Sentra Pelayanan Kepolisian;3) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;4) Meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: (1) penggelaran Satpas online; (2) penggelaran sistem STNK online; (3) penggelaran sistem BPKB online;5) Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK dan perizinan / pemberitahuan kegiatan masyarakat;6) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat.7) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Personel Polres Karanganyar dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;8) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder*s terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);9) Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;10) Mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif.11) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;12) Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal) baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;13) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.14) Meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilukada;15) Menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019. | **RM****PNBP** |  |
| **4.** | Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar | 1) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polres Karanganyar yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai;2) Membangun sistem pelayanan secara *online* dalam rangka penerbitan SKCK;3) Membangun daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk disharmoni sosial. | **RM****PNBP** |  |
| **5.** | Terjalinnya kemitraan Polri dengan instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar secara berkelanjutan | 1) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/badan terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;2) Meningkatkan kerja sama antaraparat penegak hukum di wilayah hukum Karanganyar.3) Memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;4) Mengajukan calon *Formed Police Unit (FPU )*dan *Individual Police Officer (IPO)* untuk mengikuti seleksimelalui mekanisme secara transparan. | **RM****PNBP** |  |
| **6.** | Terpenuhinya personil Bhabinkamtibmas di setiap Desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi terhadap gangguan keamanandan gejala sosial masyarakat. | 1) Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi(Bhabinkamtibmas) satu Desa/Kelurahan, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas;2) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas;4) Meningkatkan kemampuan penanganan radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;5) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;6) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;7) Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat. | **RM****PNBP** |  |
| **7.** | Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karanganyar | 1) Mengembangkan TMC yang terintegrasi;2) Memantapkan sistem *online* data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;3) Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dan *black spot* dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.4) Melakukan kajian *black spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;5) Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis;6) Melaksanakan program *road safety/safety ridding*.7) Membangun sistem edukasi berbasis teknologi (*e-educasi*) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;8) Menggelar operasi Kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;9) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013). | **RM****PNBP** |  |
| **8.** | Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polres Karanganyar. | 1) Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas;2) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnational (*cyber crime*, narkoba, *human trafficking*, *arms smuggling*, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis);3) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;4) Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar *scientific criminal investigation*;5) Mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (*illegal logging)*, kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;6) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polri yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya;7) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Polri bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait.8) Guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.9) Mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada masing-masing Fungsi dan Polsek untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana cepat;10) Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana;11) Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi).12) Meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara *(Crime Scene Investigation-CSI)* guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;13) Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah *(Scientific Criminal Investigation-SCI).* | **RM****PNBP** |  |

**BAB V**…..

**BAB V**

**P E N U T U P**

**14. Kaidah Pelaksana**

a. pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan standar etika yang tinggi.

b. melembagakan kekuatan protagonis dan komitmen Polres Karanganyar pada era demokratisasi khususnya pada aspek kultur terus berupaya menampilkan postur Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis;

c. strategi *proaktif policing*, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran;

d. membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan berbagai pihak terus dilakukan serta implementasi strategi Polmas dalam pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

**15. Autentifikasi dan distribusi.**

1. Autentifikasi, Renstra Polres Karanganyar merupakan jabaran dari Renstra Polda Jawa Tengah dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Polres Karanganyar disahkan oleh Kapolres Karanganyar sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Didistribusikan …

1. Didistribusikan kepada seluruh satfung untuk dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome.*

Ditetapkan di : Karanganyar

pada tanggal : November 2017

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

HENIK MARYANTO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75040838



